

**DESENTRALISASI POLITIK
DALAM RANAH OTONOMI DAERAH
(Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur
Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)**

Niken Nurmiyati,¹ Erni Zuhriyati,² Muhammad Noor³

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Universitas Mulawarman, Indonesia³

Email: nikennurmia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana desentralisasi politik dalam ranah otonomi daerah yang dilihat dari perspektif pemberdayaan petani bawang merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa desentralisasi politik dalam ranah pemberdayaan petani Bawang Merah telah terlaksana dengan baik. Peran serta masyarakat dan pemerintah, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Paser dan petani bawang merah saling bersinergi dan berhasil memberdayakan sehingga menghasilkan karya. Meski demikian, tetap terdapat beberapa aspek baik internal maupun eksternal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan hasil pemberdayaan yang lebih baik lagi.

Kata Kunci : *Desentralisasi Politik, Pemberdayaan, Bawang Merah*

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia, dengan dianutnya asas desentralisasi kemudian diwujudkan

dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah (Nadir, 2013).

Implementasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pendekatan yang sifatnya sentralistik menjadi desentralistik. Otonomi Daerah mengisyaratkan sebuah pemerintahan yang lebih mengutamakan kemandirian daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk kemandirian daerah ialah dengan adanya pemberdayaan

masyarakat. Baik dalam sektor industri kreatif, bidang pertanian, maupun UMKM atau sejenisnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pembangunan lokal dan nasional.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Nurmiyati, 2018). Pembangunan sejatinya perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik). Usaha memberdayakan masyarakat desa serta perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan pada masa mendatang. Kegiatan pembangunan pedesaan masih relevan untuk ditempatkan sebagai prioritas kebijaksanaan (Sunyoto Usman, 2010: 31).

Dalam pembangunan dibedakan antara pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik meliputi sarana dan prasarana, sedangkan pembangunan non fisik meliputi pemberdayaan masyarakat (Banowati, 2013). Program pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya adalah sebuah pemicu untuk peningkatan

produktivitas dan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila terjadi interaksi dan partisipasi aktif dari tiap individu dan dapat dikatakan berhasil jika masyarakat menjadi subjek, bukan objek (Wijayanti, 2018).

Pemberdayaan secara tidak langsung merupakan bentuk urusan desentralisasi politik (devolusi) sebagai perpanjangan tangan dari Bupati untuk mengurus urusan yang berkaitan dengan pertanian yang ada dalam lingkup SKPD yakni Dinas Pertanian. Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian yang membantu tugas Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati kepada Dinas Pertanian.

Salah satu bentuk program pemberdayaan di era desentralisasi dalam ranah otonomi daerah ialah komoditas hortikultura. Komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial untuk dikembangkan dalam sektor pertanian. Selain itu komoditas hortikultura diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani karena mampu memberikan nilai tambah bagi kemajuan sektor pertanian di Indonesia, dan juga mampu menunjang ketersediaan bahan pangan dalam negeri dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Komoditas hortikultura yang berpotensi untuk dikembangkan yakni Bawang Merah. Salah satu yang ingin dianalisis oleh

penulis ialah pemberdayaan petani Bawang Merah yang ada di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan angka tetap 2016 produksi bawang merah mencapai 263 ton atau sekitar 3,2 persen dari kebutuhan lokal (<http://dispertan.kaltimprov.go.id>).

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas merupakan salah satu program prioritas pembangunan Pemprov Kaltim dalam upaya mengubah struktur ekonomi, dari berbasis sumber daya alam tak terbarukan menuju berbasis sumber daya alam terbarukan. Pemprov melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (PTP) Kaltim, terus berupaya mewujudkan swasembada pangan di Kaltim. Selain mengembangkan tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai dan lainnya, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (PTP) Kaltim juga berupaya mengembangkan beberapa komoditas tanaman hortikultura, seperti bawang merah.

Kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Paser begitu besar, selain komoditi padi, palawija dan perkebunan, namun komoditi hortikultura menjadi kewenangannya. Komoditi hortikultura jika dilihat dari jenis dan jumlahnya cukup banyak yaitu untuk sayur-sayuran dan buah-buahan semusim berjumlah 26 komoditi, tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan berjumlah 25 komoditi, tanaman biofarmaka berjumlah 15 komoditi dan tanaman

hias berjumlah 24 komoditi. Di Kabupaten Paser sejak 2008 lalu ada tiga lokasi yang menjadi sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Paser, yaitu kawasan Muara Komam, Desa Padang Jaya dan Kuaro (www.kaltimprov.go.id).

Kecamatan Muara Komam adalah salah satu sentra bawang merah Kaltim yang konsisten dengan produksinya dan menyuplai kedua wilayah baik Kalimantan Timur maupun Selatan. Daerah ini sudah sekian lama cukup dikenal sebagai sentra bawang merah Kabupaten Paser (kaltim.litbang.pertanian.go.id). Desa Sekuan Makmur, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser merupakan salah satu desa yang memiliki potensi alam yang subur. Hal ini membuat beberapa tanaman mampu hidup dengan baik, seperti sayur-sayuran, palawija, buah-buahan serta satu komoditas tanaman hortikultura yakni tanaman bawang merah juga dapat hidup di sana. Mayoritas masyarakat Desa Sekuan Makmur bermata pencaharian sebagai seorang petani dan pekebun (Nurmiyati, 2018). Kecamatan Muara Komam adalah salah satu sentra bawang merah Kaltim yang konsisten dengan produksinya dan menyuplai kedua wilayah baik Kalimantan Timur maupun Selatan. Daerah ini sudah sekian lama cukup dikenal sebagai sentra bawang merah Kabupaten Paser (www.kaltim.litbang.pertanian.go.id).

Potensi alam yang ada di Desa Sekuan Makmur tersebut yang selanjutnya dimanfaatkan untuk dapat

memberdayakan masyarakatnya yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, keunggulan sentra bawang merah yang ada di Desa Sekuan Makmur menjadikan program pemberdayaan pada petani dapat diterima dengan baik dan menjadi suatu penghasilan tetap yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Berdasarkan dari uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Desentralisasi Politik dalam Ranah Otonomi daerah (Studi pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser”?

KAJIAN PUSTAKA

Desentralisasi

Smith (1985) mendefinisikan desentralisasi dari perspektif politik sebagai “pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke lokal, yakni dari tingkat atas ke lebih rendah dalam *hirarchi teritorial*”. Menurut Smith, maka ‘devolusi kekuasaan’ adalah substansi utama desentralisasi dan tidak terbatas pada susunan pemerintahan. Sementara, Rondinelli dan Cheema (1983) mendefinisikan desentralisasi dengan pandangan yang lebih luas, termasuk perspektif administrasi. Mereka secara terbuka menyatakan desentralisasi sebagai “pejngalihan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administrasi dari pemerintahan pusat kepada unit

administrasi lokal, semi otonomi, atau organisasi non-pemerintahan”. Berdasarkan definisi tersebut, Rondinelli dan Cheema (1983:18-25) telah merumuskan 4 unsur yaitu: *dekonsentrasi*, yaitu distribusi kewenangan administrasi di dalam struktur pemerintahan; *delegasi kepada semi otonomi*, yaitu delegasi kewenangan pengelolaan dan pembuatan keputusan atas fungsi-fungsi tertentu yang tidak di bawah kontrol pemerintah (pusat) langsung; *devolusi*, yaitu pengalihan fungsi dan kewenangan dari tingkat pusat ke lokal; dan *swastanisasi*, yaitu pengalihan kekuasaan dalam perencanaan dan tanggung jawab administratif kepada organisasi swasta. Desentralisasi adalah penyebarluasan kekuasaan dan kewenangan pada tingkat pemerintahan lokal (Hidayat, 2011). Secara umum, Smith (1985) membedakan dua kelompok penting sebagai tujuan desentralisasi, yakni politik dan ekonomi.

Tujuan desentralisasi dalam pandangan politik adalah mendorong pemerintahan lokal untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan politik aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan integrasi nasional. Tujuan desentralisasi ini adalah ‘berdasarkan kebebasan ide’ yang penting untuk membangun demokratisasi pemerintahan lokal sebagai prasyarat untuk melaksanakan demokratisasi dalam tingkatan nasional’ (Yluisaker, 1959:30).

Sebaliknya, pandangan ekonomi desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan lokal di dalam melengkapi barang-barang umum dan pelayanan, serta mendorong efisiensi dan efektifitas masalah lokal dalam pembangunan ekonomi (Rondinelli, 1983:4). Sedangkan Ruland (1992:3) secara kuat menekankan partisipasi sosial dalam pembangunan ekonomi sebagai tujuan desentralisasi. Lebih lanjut Ruland menggariskan: “Desentralisasi sebagai hasil otonomi lokal, dilihat sebagai kontribusi yang positif untuk menambah partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya menjurus kepada pembangunan sosial dan ekonomi”.

Berdasarkan berbagai literatur yang ada, ada beragam argumen-argumen teoritik yang mendukung desentralisasi, yang bisa dikategorikan ke dalam tiga tema utama. *Pertama*, berdasarkan perspektif administratif, di antara justifikasi yang paling banyak dikutip adalah bahwa desentralisasi memiliki potensi untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi yang lebih besar dalam urusan-urusan administratif lokal, khususnya pemberian layanan publik (Breton, 2000). Ditambah lagi, desentralisasi juga memungkinkan pemberian layanan yang lebih murah karena pemerintah lokal dapat memangkas prosedur yang panjang dan kompleks dari perencanaan yang terpusat (Rondinelli, Nellis & Cheema, 1983).

Kedua, perspektif ekonomi, desentralisasi memiliki potensi untuk mengembangkan pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Rahmatunnisa, 2011). Desentralisasi dapat mengurangi biaya, memperbaiki pelayanan dan lebih efektif dalam memanfaatkan SDM (Hart, 1972). Ditambah lagi, karena desentralisasi memberikan penduduk lokal kekuasaan untuk mengawasi pemimpin politik yang dipilihnya, hal tersebut dapat meningkatkan motivasi pemerintah untuk memuaskan keinginan warganya (Breton 2000). *Ketiga*, desentralisasi dapat memfasilitasi stabilitas politik dan partisipasi. Desentralisasi mengasumsikan bahwa penduduk lokal memiliki hak untuk memilih pemimpinnya yang mereka anggap dapat dipercaya, dan kehadiran aparat pemerintah terpilih ini akan mendukung “social harmony, community spirit and political stability” dengan mendorong partisipasi aktif dari warga lokal dalam proses pembuatan kebijakan dan juga pelaksanaannya (Smith, 1985; Blair, 2000). Mengurangi konsentrasi kekuasaan juga dilihat sebagai sebuah strategi untuk memelihara integrasi nasional dan stabilitas dengan menekan gerakan-gerakan separatis.

Devolusi merupakan inti dari desentralisasi. Samoff (1990) mengatakan bahwa secara konseptual, devolusi mengandung makna pemberdayaan mereka yang tidak terwakili (under-represented) dan kelompok-kelompok yang kurang

beruntung (disadvantaged groups) melalui penyerahan kewenangan pengambilan keputusan yang aktual. Tanpa memberdayakan disadvantaged groups, tidak ada desentralisasi. Oleh karena itu, melalui devolusi urusan-urusan lokal dapat menjadi domain dari penduduk lokal ketimbang mereka yang dipekerjakan di pusat administrasi pemerintah. Devolusi menjanjikan partisipasi aktif masyarakat lokal, memungkinkan mereka untuk meminta pertanggungjawaban politisi terpilih dan aparat pemerintah. Dengan kata lain, devolusi menjanjikan *democratic decentralization*. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa substansi dari desentralisasi yang menghasilkan otonomi daerah adalah adanya partisipasi masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat maka akan tumbuh kemandirian masyarakat dalam menentukan masa depan mereka sendiri dengan otonomi yang mereka miliki.

Devolusi adalah pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintahan di tingkat lokal oleh pemerintah pusat dengan control pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Menurut Hanson (1964), bentuk desentralisasi devolusi juga dinamakan sebagai desentralisasi politik (*political decentralization*) ini karena wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan politik.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Wiku Adisasmito (2010:175) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-jugat demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strenght*) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk (terus-menerus) meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat “bawah” yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan

meningkatkan kemandirian masyarakat.

Moh. Ali Aziz, dkk (2005:136) mengartikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Meminjam definisi *Asian Development Bank* (ADB) yang ditulis Latama, Gunarto, *et al.*, (2002: 4) dalam Zubaedi (2013:76), kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik: (1) Berbasis lokal; (2) Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) Berbasis kemitraan; (4) Secara holistik; dan (5) Berkelanjutan.

Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Soedijanto (2001) dalam Totok Mardikanto dan

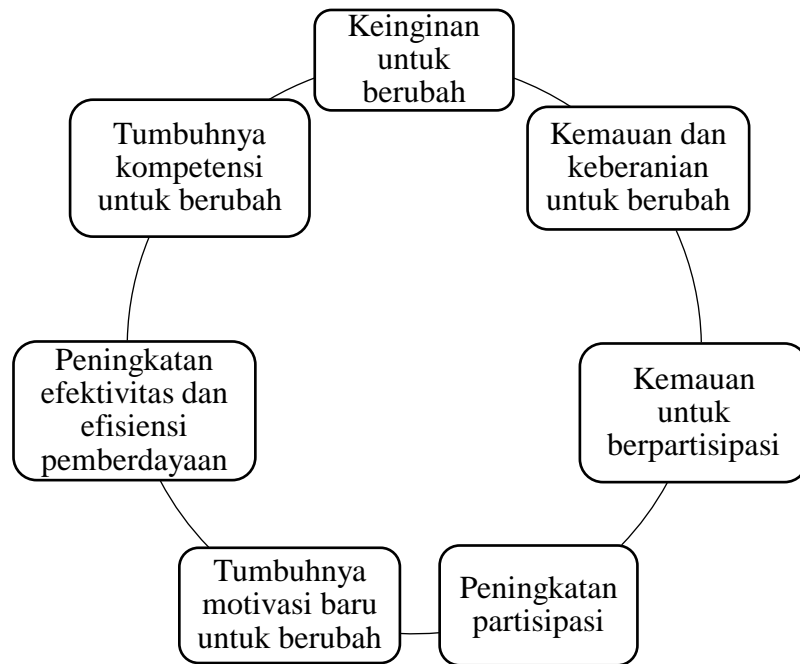
Poerwoko Soebianto (2015:108-109) yakni:

1. Kesukarelaan, artinya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya;
2. Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain;
3. Keswadayaan, yaitu kemampuan untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar;
4. Partisipatif, yaitu keterlibatan semua *stakeholders* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya;
5. Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan;
6. Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama *stakeholders*;

7. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan;
8. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme;
9. Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun;
10. Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah

otonom (kabupaten dan kota) untuk mngoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

Selain prinsip pemberdayaan masyarakat di atas, berikut merupakan tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat:



Gambar 1 : Siklus Pemberdayaan Masyarakat

MOTODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong metode kualitatif meliputi observasi dokumen, wawancara, atau studi (Yulindaningtyas, 2015). Karena sejumlah alasan, metode kualitatif ini digunakan. Pertama, ketika berhadapan

dengan realitas majemuk, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah. Kedua, metode ini secara langsung menyajikan sifat hubungan peneliti-responden. Ketiga, metode ini lebih sensitif dan mudah beradaptasi dengan banyak efek penajaman pengaruh timbal balik pada pola nilai yang telah ditemukan.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yang penggunaannya disesuaikan dengan jenis dan sifat yang diperoleh untuk membuat data yang diperoleh benar-benar objektif. Metode pengumpulan data dibagi menjadi tiga jenis dasar penelitian kualitatif, yaitu: dengan wawancara, observasi dan kepustakaan, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik kepustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan berkaitan metode pengumpulan data secara pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Supriyadi, 2016). Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi serta data dengan berbagai macam material pustaka, seperti dokumen, malah, buku, majalah, penelitian terdahulu, kisah-kisah sejarah dan lainnya (Mirzaqon & Purwoko, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi Politik dalam Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Hakikat dan spirit otonomi daerah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 adalah untuk mendorong prakarsa lokal dalam membangun kemandirian daerah dalam wadah NKRI. UU No. 23 tahun 2014 merupakan manifestasi dan aktualisasi spirit otonomi daerah

yang bermuatan *political sharing*, *financial sharing*, dan *empowering* dalam mengembangkan kapasitas daerah (*capacity building*), peningkatan SDM dan partisipasi masyarakat (Akbal, 2016). Sebagai suatu sistem, desentralisasi saling berinteraksi dengan lingkungannya dimana desentralisasi beroperasi. Lingkungan tersebut dapat berupa faktor politik, sosiobudaya, ekonomi, historis dan geografis (Nur & Susanto, 2019). Era otonomi daerah dalam dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia sekarang ini, menuntut adanya regulasi daerah untuk menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan percepatan pembangunan yang ada di daerah (Ismail, 2018)

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat lokal/di daerah dalam era reformasi dan dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memerlukan kejelasan dan ketegasan visi, misi dan strategi dari pemerintah daerah yang merupakan kesepakatan politis dari pemerintah daerah yang merupakan kesepakatan politis pada masing-masing level pemerintahan tanpa mengorbankan masyarakat sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, sehingga tidak bisa dipungkiri adanya kemungkinan dan peluang dalam memberdayakan masyarakat lokal di Indonesia (Alam, 2007).

Sebagai daerah administrasi, desa harus mampu mengelola daerahnya dan

memberdayakan warganya dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kerjasama antar desa, meningkatkan kemitraan untuk pengembangan potensi desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintah desa harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melakukan upaya-upaya efektif penggerakan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat desa (Herry, 2015).

Desa Sekuan Makmur merupakan sentra penghasil bawang merah terbesar di Kabupaten Paser bahkan penjualannya mencapai 3 Provinsi, yakni Kaltim, Kalsel dan Kalteng. Hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika masyarakat yang ada di Desa Sekuan Makmur tidak diberdayakan dengan baik. Dengan bermata pencaharian sebagai petani, akhirnya petani di Desa Sekuan Makmur mencoba peruntungan untuk mengembangkan komoditas

tanam pangan dan hortikultura tanaman bawang merah. Pemberdayaan kepada petani Bawang Merah tersebut sebagai bentuk desentralisasi politik di mana Dinas Pertanian menjadi perpanjangan tangan dari Bupati untuk mengurus tentang pertanian. Dinas pertanian memberikan bantuan bawang merah kepada petani di Desa Sekuan Makmur untuk diberdayakan dalam sektor pertanian. Bukan hanya bibit, Dinas Pertanian juga memberikan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dan pupuk. Hasil panen bawang merah tidak perlu dikembalikan atau diberikan keuntungannya kepada Dinas Pertanian, namun murni 100% diberikan kepada petani. Hal tersebut tentu memberikan dampak pada perekonomian dan kemandirian masyarakat yang ada di Desa Sekuan Makmur. Berikut merupakan tanaman bawang merah yang ada di Desa Sekuan Makmur :



Gambar 2 : Tanaman Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur

Sumber : Diolah Penulis 2019

Prinsip-Prinsip Pemeberdayaan Masyarakat dalam Desentralisasi Politik

Berikut merupakan indikator yang menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

a) Kesukarelaan

Artinya bahwa pemberdayaan masyarakat perlu adanya keterlibatan seseorang atau sekelompok orang yang di dalamnya tidak boleh adanya pemaksaan, yakni harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasi untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya. Prinsip kesukarelaan tercermin di Desa Sekuan Makmur bahwasannya kegiatan pemberdayaan petani bawang merah bersifat sukarela dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dinas Pertanian memberikan bantuan bibit bawang merah untuk selanjutnya di distribusikan pada setiap kelompok petani bawang merah yang ada di Desa Sekuan Makmur.

b) Otonom

Yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain. Artinya petani bawang merah yang telah diberdayakan di Desa Sekuan Makmur memiliki keahlian dan ciri khas dibandingkan dengan daerah

lain. Selanjutnya Desa Sekuan Makmur menjadi sentra penghasil bawang merah hingga menembus pasar 3 Provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hal tersebut menandakan bahwa, meski berada dalam lingkup terendah yakni di tingkat Desa, namun kemandirian terus dapat dirasakan dan bahwan dikembangkan oleh petani bawang merah. Hal tersebut dikarenakan, petani bawang merah yang ada di Desa Sekuan Makmur sangat terbuka terhadap proses pemberdayaan meski tidak semua penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Penanaman bawang merah dapat dijadikan penghasilan selingan untuk menambah dan meningkatkan perekonomian keluarga khususnya dan perekonomian Desa pada umumnya.

c) Keswadayaan

Yaitu kemampuan untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar. Petani di Desa Sekuan Makmur sangat swadaya dalam proses pemberdayaan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena petani Desa Sekuan Makmur memiliki kelompok yang telah terorganisir. Berikut merupakan kelompok petani bawang merah di Desa Sekuan Makmur :

No.	Kelompok 1	Nama	Jabatan	Status
1.	Sinar Jaya	Castro	Ketua Kelompok	Petani
2.		Gimo	Anggota	Petani
3.		Sri Widiawati	Anggota	Petani & Pelaku Agribisnis
4.		Ambar Fauzi	Anggota	Petani
5.		Kamijan	Anggota	Petani & Pelaku Agribisnis
6.		Ahmad Jasmilan	Anggota	Petani
7.		Kusnali	Anggota	Petani
8.		Dulrohim	Anggota	Petani
9.		Ngadenan	Anggota	Petani
10.		Sarno	Anggota	Petani
11.		Muslihuiddin	Anggota	Petani
12.		Anto	Anggota	Petani
13.		Sarwadi	Anggota	Petani

Sumber: Nurmiyati, 2018

No.	Kelompok 2	Nama	Jabatan	Status
1.	Duyun Sejahtera	Syamsi Abdul Wahid	Ketua Kelompok	Petani
2.		H. Zainuddin	Anggota	Petani
3.		Badrun	Anggota	Petani
4.		Riswanto	Anggota	Petani
5.		Supartik	Anggota	Petani
6.		Imbuh Sudrajat	Anggota	Petani
7.		Sodiman Ali Aziz	Anggota	Petani & Pelaku Agribisnis
8.		Nanti	Anggota	Petani
9.		Kawiyono	Anggota	Petani
10.		Sodik	Anggota	Petani
11.		Sarkawi	Anggota	Petani
12.		Imam Supiadi	Anggota	Petani
13.		Fahruzi	Anggota	Petani
14.		Kursani	Anggota	Petani

Sumber: Nurmiyati, 2018

No.	Kelompok 3	Nama	Jabatan	Status
1.	Usaha Jaya	Abdul Malik	Ketua Kelompok	Petani
2.		Warsan	Anggota	Petani
3.		Saidurrohman	Anggota	Petani
4.		Suparman	Anggota	Petani
5.		Heri	Anggota	Petani
6.		Sapri	Anggota	Petani
7.		Kuntadi	Anggota	Petani
8.		Santo	Anggota	Petani
9.		Sobirin	Anggota	Petani
10.		Kateno	Anggota	Petani
11.		Sutejo	Anggota	Petani
12.		Jadi	Anggota	Petani

13.		Sopan	Anggota	Petani
-----	--	-------	---------	--------

Sumber: Nurmiyati, 2018

No.	Kelompok 4	Nama	Jabatan	Status
1.	Dwi Karya	Tarmin	Ketua Kelompok	Petani
2.		Rudi Hartono	Anggota	Petani
3.		Syaiful Mu'min	Anggota	Petani
4.		Bukhori	Anggota	Petani
5.		Yaji	Anggota	Petani
6.		Sungkono	Anggota	Petani
7.		Jumadi	Anggota	Petani
8.		Sunar	Anggota	Petani
9.		Ran	Anggota	Petani
10.		Sukiman	Anggota	Petani
11.		Nahmil Adzim	Anggota	Petani
12.		Rebin	Anggota	Petani
13.		Ngasirin	Anggota	Petani
14.		Matrofi	Anggota	Petani
15.		Abdul Hadi Zahuri	Anggota	Petani

Sumber: Nurmiyati, 2018

d) Partisipatif

Yaitu keterlibatan semua *stakeholders* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya. Setelah Dinas Pertanian Kabupaten Paser memberikan bantuan bibit bawang merah kepada petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur, maka prinsip partisipatif tidak

boleh dilupakan. Berikut merupakan salah satu kegiatan partisipatif yang melibatkan *stakeholders*, yakni pada proses pemantauan lahan tanaman bawang merah. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan pemantauan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Paser yang di dampingi oleh Kepala Desa Sekuan Makmur.



Gambar 2 : Proses pemantauan kegiatan tanaman bawang merah

e) Egaliter

Menempatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat maka seluruh stakeholder memiliki kedudukan yang setara. Adanya pihak yang berdaya dan diberdayakan.

f) Demokrasi

Memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama *stakeholders*. Hal ini tentu dijunjung tinggi dalam kegiatan pemberdayaan dimana prinsip demokrasi dihargai dan dijunjung tinggi.

g) Keterbukaan

Yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan. Hal ini dikarenakan dalam proses pemberdayaan harus terbuka. Hal tersebut agar nilai desentralisasi politik masih terus dijaga nilai-nilainya.

h) Kebersamaan

Untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme. Masyarakat yang diberdayakan harus memiliki prinsip kebersamaan agar beban dapat diringankan.

i) Akuntabilitas

Yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun. Hal ini dapat dievaluasi

tentang hasil panen petani dalam menanam bawang merah. Meski bersifat pemberdayaan dan bantuan dari Dinas Pertanian, namun prinsip akuntabilitas tetap harus dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas vertikal dan horizontal.

j) Desentralisasi

Yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan. Dalam prinsip ini sudah barang tentu bahwa kegiatan pemberdayaan sangat erat dengan desentralisasi yang memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam pemberdayaan petani bawang merah di Desa Sekuan Makmur.

Aspek Internal Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Aspek internal dalam pemberdayaan petani bawang merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam memberikan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan bagi petani dan pelaku agribisnis

- Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompeten sangat membantu dan menentukan keberhasilan suatu program. Dalam kaitannya dengan kegiatan pelatihan, pendampingan dan penyuluhan biasanya menggunakan narasumber dari Dinas Pertanian Kabupaten (Kabid TPH dan petugas PPL), Dinas Pertanian Provinsi, *Stakeholder* yang berasal dari Bank Indonesia (BI), maupun orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dimaksudkan agar para petani mendapatkan ilmu dan pemahaman yang langsung berasal dari pakarnya dan dapat dipraktekkan dengan benar.
2. Adanya dukungan dana anggaran untuk melakukan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan bagi petani dan pelaku agribisnis
Dana anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung secara finansial kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.
 3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk melakukan pelatihan, penyuluhan serta pendampingan bagi petani dan pelaku agribisnis
Sarana dan prasarana sangat berperan penting dalam mendukung suatu kegiatan. Terlebih sarana dan prasarana pertanian yang meliputi alat-alat produksi pertanian dan perkebunan (Alsintan). Seperti Kultifator (alat penggembur tanah), *Handsprayer* (semprotan), Alkon (pompa air), Drum air, Cangkul, Terpal, sampai kepada bibit dan pupuk yang diperlukan dalam perawatan bawang merah. Semua sarana dan prasarana tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Provinsi.
 4. Adanya partisipasi petani dan pelaku agribisnis dalam mengikuti pelatihan dan penyuluhan pertanian
Banyaknya antusias petani dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan penyuluhan sangat membantu suksesnya sebuah agenda ataupun kegiatan. Banyaknya pelatihan dan penyuluhan yang diikuti diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam bertani, mulai dari penanaman, perawatan, panen, pasca panen hingga pada penjualan dan pembibitan bawang merah.
 5. Rendahnya nilai tambah produk-produk pertanian dikarenakan pemahaman petani dan pelaku agribisnis yang masih belum maksimal Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan pengalaman petani. Semakin banyak pelatihan dan pengalaman, maka biasanya petani akan semakin mahir dalam mengatasi masalah dalam

bercocok tanam. Rendahnya nilai tambah produk dikarenakan ada beberapa petani yang masih baru tergabung dan menanam bawang merah. Kurangnya bertanya kepada yang lebih paham juga membuat hasil produk pertanian menjadi rendah. Seperti kurang mampunya mengatasi hama tanaman, kurang mampu menggunakan Alsintan dan sebagainya.

6. Belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) pertanian/perkebunan
Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya lahan-lahan pertanian yang masih kosong dan tidak ditanami. Padahal kondisi tanah yang subur sangat berpotensi untuk menghasilkan tanaman yang baik.
7. Belum adanya kantor tetap bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser
Jauhnya akses dari Kabupaten ke dasa-desa membuat jarak tempuh menjadi semakin lama. Terlebih tidak adanya kantor tetap di setiap desa membuat PPL tidak bisa menetap di lapangan jika ada keluhan atau kendala dalam hal pertanian
8. Masih sulitnya akses jaringan internet di beberapa daerah sehingga berdampak pada kurang luasnya pangsa pasar penjualan produk pertanian (penjualan online melalui situs tertentu) dan sulitnya komunikasi dengan PPL maupun dengan *stakeholder* Dinas Pertanian

Salah satu kendala yang sangat dirasakan petani dan masyarakat sekitar ialah masih sulitnya akses jaringan internet. Padahal jika akses jaringan internet baik, hal tersebut dapat memperluas pangsa pasar penjualan produk-produk pertanian. Selain itu juga jika ada hal yang bersifat urgent dalam hal pelatihan atau penyuluhan, informasi yang diperoleh relatif lambat.

Aspek Eksternal Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

Aspek internal dalam pemberdayaan petani bawang merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut :

1. Peluang pemasaran hasil pertanian terbuka luas hingga lintas Provinsi
Meningkat hingga sejauh ini penjualan bawang merah sudah menjangkau 3 Provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi petani bawang dan bagi Desa Sekuan Makmur untuk lebih produktif dan tidak menutup kemungkinan dapat menjadi sentra dan produsen bawang merah yang unggul. Harga penjualan bawang merah pun tergolong menjanjikan. Berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Paser harga

- penjualan bawang merah berkisar dari harga Rp. 13.000,00 – Rp. 30.000,00. Murah atau mahal nya harga jual bawang merah juga biasanya tergantung kepada kondisi pasar, banyaknya permintaan dan adanya hari-hari besar keagamaan atau yang lainnya yang membuat pembelian bawang merah meningkat. Untuk penjualan bawang merah tersebut bisa dilakukan oleh pelaku agribisnis yang kurang lebih berjumlah 3 orang yang ada di Desa Sekuan Makmur, atau bisa juga tengkulak dari daerah ataupun Provinsi lain yang langsung datang ke Desa Sekuan Makmur dan melakukan transaksi jual beli bawang merah milik petani.
2. Petani memiliki kemampuan dalam menggunakan alat-alat produksi pertanian dan perkebunan (Alsintan) serta pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) setelah diberikan pelatihan dan pendampingan Penggunaan alat-alat produksi pertanian dan perkebunan (Alsintan) serta pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan salah satu modal utama dalam pertanian. Teknologi Tepat Guna dimaksudkan untuk lebih mengembangkan hasil pertanian dan meningkatkan kualitas produk pertanian agar mampu bersaing dengan produk dari daerah lain.
 3. Adanya kelompok tani/gabungan kelompok tani (Gapoktan) Hal ini dimaksudkan agar petani menjadi lebih terkoordinir dan terstruktur. Dalam hal pemberian pelatihan biasanya yang pertama akan diberikan informasi ialah ketua kelompok, maka selanjutnya ketua kelompok tersebut yang akan menyebarkan informasi kepada anggota-anggotanya. Gapoktan juga berfungsi sebagai wadah untuk menampung ide dan gagasan demi keberlangsungan pertanian di masa yang akan datang.
 4. Adanya dukungan dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa serta masyarakat setempat Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa menyambut baik program yang diberikan oleh Dinas Pertanian berupa bibit bawang merah, karena hal tersebut selain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, kegiatan semacam itu dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat yang berdampak pada peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat Desa Sekuan Makmur.
 5. Adanya alih fungsi lahan, sumber daya air, serta ancaman iklim yang tidak menentu Hal ini membuat petani cukup cemas. Terlebih tanaman bawang merah merupakan tanaman yang sangat membutuhkan air. Begitu pula dengan adanya alih fungsi lahan. Awalnya lahan pertanian bisa jadi berubah menjadi tanah permukiman warga dan lain sebagainya. Di sinilah peran serta PPL dalam memberikan penyuluhan terkait cara mengatasi kekurangan

air, alih fungsi lahan serta cuaca yang terkadang sering berubah-ubah.

6. Rendahnya akses petani ke sumber permodalan serta masih susahny petani bawang merah dalam memproduksi bibit serta tidak adanya gudang penyimpanan hasil panen

Kualitas bibit yang baik maka akan berpengaruh terhadap kualitas panen. Semakin baik bibit bawang merah dan semakin ahli petani dalam membasmi hama maka kualitas hasil panen akan semakin baik. Hasil panen tersebut dapat diolah dan dijadikan bibit untuk ditanami kembali. Gudang penyimpanan hasil panen juga sangat diperlukan, mengingat pada saat satu kali panen jika kualitasnya baik dapat mencapai 8 ton hingga 10 ton. Sama halnya dengan modal. Terkadang petani kesusahan mencari modal untuk membeli pupuk dan obat-obatan lain guna mengatasi hama tanaman.

7. Anggaran yang dikeluarkan cukup besar karena beberapa kegiatan pelatihan dilakukan di luar daerah bahkan sampai ke luar pulau
Anggaran yang ditanggung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Paser cukup besar jika ada pelatihan tentang bawang merah. Secara tidak langsung Dinas Pertanian Kabupaten Paser mengakomodasi perjalanan peserta, baik peserta yang berasal dari staff Dinas Pertanian Kabupaten Paser maupun petani

bawang merah yang dipilih secara acak oleh Dinas Pertanian Kabupaten Paser.

8. Adanya penyakit tanaman yang sering menyerang bawang merah
Adanya penyakit tanaman yang sering mewabah ialah penyakit *moler* (daun bawang merah menjadi keriting dan berwarna kekuning-kuningan). Hal ini menyebabkan tanaman di sekitarnya mudah tertular dan tanaman bawang merah tidak dapat kembali normal. Oleh karenanya perlu adanya pendampingan khusus dalam mengatasi masalah tersebut.

KESIMPULAN

Desa Sekuan Makmur merupakan sentra penghasil bawang merah terbesar di Kabupaten Paser bahkan penjualannya mencapai 3 Provinsi, yakni Kaltim, Kalsel dan Kalteng. Hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika masyarakat yang ada di Desa Sekuan Makmur tidak diberdayakan dengan baik. Dengan bermata pencaharian sebagai petani, akhirnya petani di Desa Sekuan Makmur mencoba peruntungan untuk mengembangkan komoditas tanam pangan dan hortikultura tanaman bawang merah. Pemberdayaan kepada petani Bawang Merah tersebut sebagai bentuk desentralisasi politik di mana Dinas Pertanian menjadi perpanjangan tangan dari Bupati untuk mengurus tentang pertanian. Dinas pertanian memberikan bantuan bawang merah pada petani di Desa Sekuan Makmur untuk diberdayakan dalam sektor

pertanian. Bukan hanya bibit, Dinas Pertanian juga memberikan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dan pupuk. Hasil panen bawang merah tidak perlu dikembalikan atau diberikan keuntungannya kepada Dinas Pertanian, namun murni 100% diberikan kepada petani. Hal tersebut tentu memberikan dampak pada perekonomian dan kemandirian masyarakat yang ada di Desa Sekuan Makmur

Dalam desentralisasi politik dengan kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat maka sebaiknya lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan tidak mendominasi kepentingan politik. Pemberdayaan petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur perlu ditingkatkan lagi dan dapat menyebar ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Paser dengan potensi alam yang cocok untuk budi daya tanaman pangan hortikultura bawang merah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbal, M. (2016). *Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jurnal Supremasi, Xi(2), 99–107.
- Alam, A. S. (2007). *Tantangan Dan Peluang Indonesia Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(1), 25–34.
- Ayu Diah Amalia, M. S. P. (2015). *Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi*. Sosio Informa, 1(02), 175–188.
- Aziz, Moh. Ali dkk. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Nusantara
- Banowati, E. (2013). *Geografi Sosial*. Yogyakarta: Ombak
- Blair, H. (2000), 'Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance in Six Countries', World Development, vol. 28, no. 1, pp. 21-39.
- Breton, A. (2000), 'Federalism and Decentralization: Ownership Rights and the Superiority of Federalism', Publius, vol. 30, no. 2, pp. 1-17.
- Hart, D. K. (1972), 'Theories of Government Related to Decentralization and Citizen Participation', Public Administration Review, vol. 32, no. Special Issue: Curriculum Essays on Citizens, Politics, and Administration in Urban

- Neighborhoods (October), pp. 603-621
- Herry, A. (2015). *Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa)*. Jurnal Ilmiah Civis, V(1), 737–751.
- Ismail, N. (2018). *Desentralisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo*. Gorontalo Law Review, 1(2), 41–48.
- Jati, W. R. (2012). *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia : Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi*. Jurnal Konstitusi, 9(4), 743–769.
- Kariati, I. W. E. A. N. M., & Sukarta, I. W. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Community Development (Studi Ekploratif Di Kawasan Wisata Sangeh)*. Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora, 6(3), 238–248.
- Kuswandi, A. (2011). *Desentralisasi Pendidikandalam Penyelenggaraanotonomi Daerahdi Indonesia*.
- Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2015). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*, 1–8.
- Nadir, S. (2013). *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik, 1(1).
- Nur, S., & Susanto, H. (2019). *Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan*. Administrative Law & Governance Journal, 2(4), 631–649.
- Rahmatunnisa, M. (2011). *Desentralisasi Dan Demokrasi*, 36(4), 475–487.
- Rondinelli And Cheema. 1983. *“Decentralization In Developing Countries: A Review Of Recent Experience”*. The World Bank. Washington
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization, The Territorial Dimension Of The State*. London, United Kingdom: George Allen & Unwin.
- Syamsuddin Haris. 2007. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Lippi Pres. Hal 56

- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*
- Website dan Dokumen :**
<http://dispertan.kaltimprov.go.id>
www.kaltimprov.go.id
- Supriyadi. (2016). *Community Of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*. Lentera Pustaka, 2(2), 83–93.
- Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (8) tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Walintukan Veybe, Kindangen Paulus, E. W. (2019). *Pengaruh Desentralisasi, Pertumbuhan Pad Dan Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Di Provinsi Sulut Tahun 2009-2017*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 1–12.
- Wijayanti. (2018). *Strategi Pembangunan Desa Melalui Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)*, 446–458.
- Yulindaningtyas, D. (2015). *Kualitas Pelayanan Kependudukan Terhadap Kepuasan Masyarakat*, 4(2), 418–425.
- Zakiah, U., & Idrus, I. A. (2017). *Srategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 84–95.